

# **RENCANA STRATEGIS**

## **(RENSTRA) 2025-2029**



**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**DAERAH**

**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari RPJMD salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah, didalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Renstra ini merupakan manifestasi komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kinerja. Dengan Renstra ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan/ perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menetapkan skala prioritas program/ kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas suatu program/ kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum pemerintahan dan sebagai acuan pencapaian selama lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan pelayanan menuju Tanjung Jabung Barat Berkah Madani 2025 ( Berkualitas, Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis dan Mandiri Berinovasi ) sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat.

Semoga dengan tersusunnya Renstra yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
  
**HIDAYAT, SH, MH**  
NIP. 19660710 199403 1 013

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

### BAB I PENDAHULUAN

|     |                        |   |
|-----|------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang         | 3 |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | 4 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan      | 7 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan  | 7 |

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

|     |                                                           |    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah               | 9  |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah                              | 13 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah                        | 16 |
| 2.4 | Kelompok Sasaran Layanan                                  | 19 |
| 2.5 | Permasalahan Pelayanan dan Isu strategis Perangkat Daerah | 25 |
| 2.6 | Isu Strategis                                             | 27 |

### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

|      |                                                                                                                         |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. | Tujuan dan Sasaran Renstra                                                                                              | 29 |
| 3.2  | Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 | 32 |
| 3.3  | Penahapan Renstra Perangkat Daerah                                                                                      | 34 |

### BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

|     |                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif. | 36 |
| 4.2 | Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.               | 40 |
| 4.2 | Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)                               | 60 |

### BAB V PENUTUP

|     |            |    |
|-----|------------|----|
| 5.1 | Kesimpulan | 64 |
|-----|------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyesuaian rencana kerja Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategik akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan, mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Bupati Terpilih.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Berdasarkan ketentuan yang ada, setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra OPD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program. Renstra OPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unit kerja kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan keuangan daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1 )
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3 )
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 Nomor 11 );
21. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Memberikan arah dan kebijakan operasional bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun kedepan serta sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Rencana Program dan Prioritas pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

#### **b. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD adalah :

1. Menjadi dasar acuan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) Tahun periode Renstra 2025 - 2029;
2. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025- 2029;
3. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD setiap tahun pada periode renstra tahun 2025 – 2029;
4. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD yang sejalan dengan arah RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dalam Rencana Strategis ( Renstra ) ini disajikan data kegiatan yang bersifat Strategis, yaitu data kegiatan pengelolaan keuangan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai obot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai visi melalui misi yang diemban serta tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu strategis Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 3.3 Penetapan Renstra Perangkat Daerah

## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif.
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah.
- 4.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

## **BAB V PENUTUP**

- 5.1 Kesimpulan

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok yaitu: Memberikan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, serta penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian DPRD. Tugas ini dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tiga fungsi utama DPRD: legislasi, anggaran, dan pengawasan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, termasuk surat menyurat, dokumentasi, dan arsip.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, termasuk pengelolaan anggaran, perjalanan dinas, dan tunjangan anggota DPRD.
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat-rapat DPRD, baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat alat kelengkapan DPRD, maupun kunjungan kerja.
4. Fasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan produk hukum DPRD, seperti peraturan daerah (Perda), keputusan DPRD, dan rekomendasi.
6. Fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPRD, baik secara langsung maupun melalui mekanisme reses dan audiensi.
7. Pengelolaan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD, termasuk pengembangan kapasitas dan kedisiplinan pegawai.
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai peraturan yang berlaku.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu dari OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikepalai oleh seorang Sekretaris, dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian dan masing-masing bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan Tenaga Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian adalah sebagai berikut:

#### **A. SEKRETARIS**

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris di bantu oleh 3 (tiga) Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan masing-masing bagian dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

#### **B. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, Kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi umum dan keuangan sekretariat DPRD. Dalam melaksanakan tugas tersebut bagian umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD,
- b. pengelolaan kepegawaian sekretariat DPRD,
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD,
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD,
- e. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD,
- f. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD,
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD,
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD,
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD,

- j. penyusunan perencanaan anggaran sekretariat DPRD,
- k. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran sekretariat DPRD,
- l. verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga sekretariat DPRD,
- m. verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD,
- n. penyelenggaraan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD,
- o. pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD,
- p. pengoordinasian pengelolaan anggaran sekretariat DPRD,
- q. verifikasi pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD,
- r. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sekretariat DPRD,
- s. pengoordinasian dan pengevaluasian laporan keuangan sekretariat DPRD,
- t. pengevaluasian penadministrasian dan akuntansi keuangan sekretariat DPRD,
- u. penyusunan laporan kerja dan anggaran sekretariat DPRD,
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**a. Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.**

Kepala Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan berada dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.Kasubbbag Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketatusahaan, menyusun administrasi dan operasional pelayanan kepegawaiaan.Dalam melaksanakan hal tersebut Sub bagian Tata usaha dan Kepegawaiaan mempunyai tugas:

- 1. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
- 2. melaksanakan kearsipan;
- 3. menyusun administrasi kepegawaiaan;
- 4. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaiaan
- 5. menyiapkan bahan administari kepegawaiaan;
- 6. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;
- 7. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan Anggaran Sub bagian ;

**C. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bagian persidangan dan Perundang-undangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan perundang-undangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- 1 penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- 2 fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- 3 fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda Inisiatif;
- 4 verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5 pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- 6 fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- 7 penyusunan risalah rapat;
- 8 pengoordinasian pembahasan Raperda;
- 9 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
- 10 verifikasi, pengoordinasian dan evaluasi risalah rapat;
- 11 penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- 12 penyelenggaraan publikasi; dan
- 13 penyelenggarakan keprotokolan.

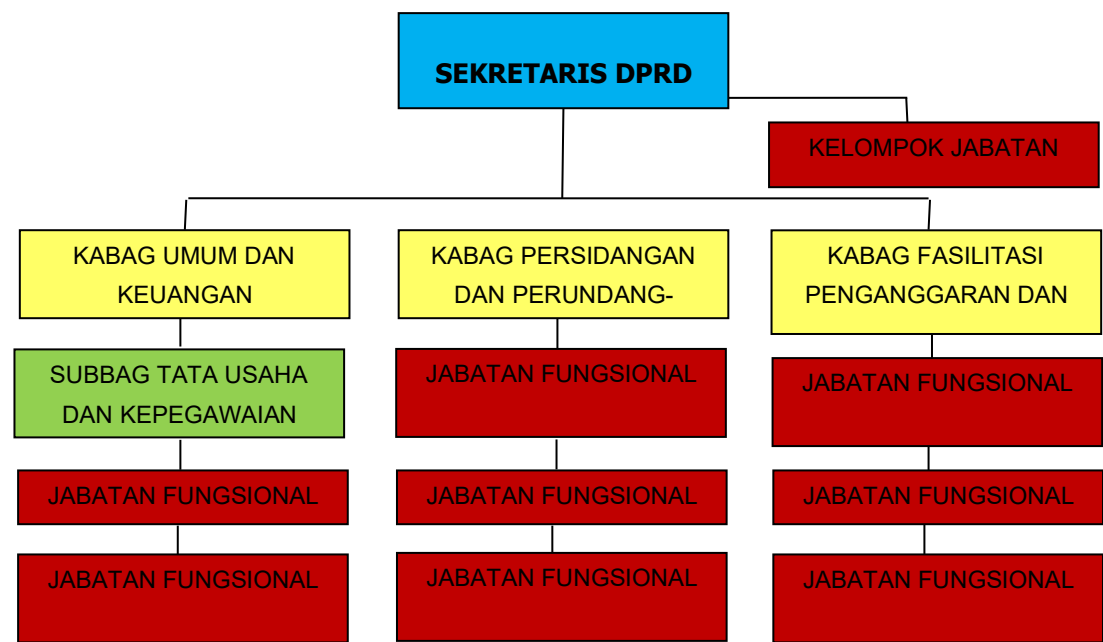
#### **D. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan Pengawasan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
2. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian Pembahasan APBD/APBDP;
3. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian aspirasi masyarakat;
8. fasilitasi, pengoordinasian dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian pengawasan pelaksanaan kebijakan;

- 12. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian penyusunan pokokpokok pikiran DPRD;
- 13. fasilitasi, verifikasi, dan pengoordinasian persetujuan kerjasama daerah;

Adapun Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini:



2.2 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentunya tidak terlepas dari Sumber Daya Aparatur yang dimiliki serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

a. Sumber Daya

Adapun gambaran kondisi sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD keadaan April 2025 adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan                     | Formasi | Terisi | Ket |
|-----|-----------------------------|---------|--------|-----|
| 1.  | Eselon II                   | 1       | 1      | -   |
| 2.  | Eselon III                  | 3       | 3      | -   |
| 3.  | Eselon IV                   | 1       | 1      | -   |
| 4.  | Kelompok Jabatan Fungsional | 26      | 9      | -   |
| 5.  | Fungsional Umum             | 29      | 20     |     |
|     | Jumlah                      | 60      | 34     |     |

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 34 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

| No. | Jabatan      | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-----|--------------|-----------|--------|--------|
| 1.  | Magister S-2 | 1         | -      | 1      |
| 2.  | Sarjana S-1  | 12        | 14     | 26     |
| 3.  | DIII         | 0         | 1      | 0      |
| 4.  | SLTA         | 6         | -      | 4      |
| 5.  | SLTP         | 0         | -      | -      |
|     | Jumlah       | 19        | 16     | 34     |

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

| No. | Jabatan        | Laki-laki | Wanita | Jumlah |
|-----|----------------|-----------|--------|--------|
| 1.  | Golongan IV/c  | 1         | -      | 1      |
| 2.  | Golongan IV/b  | 1         | 1      | 1      |
| 3.  | Golongan IV/a  | 2         | -      | 2      |
| 4.  | Golongan III/d | 3         | 2      | 5      |
| 5.  | Golongan III/c | 1         | 1      | 2      |
| 6.  | Golongan III/b | 2         | 4      | 6      |
| 7.  | Golongan III/a | 4         | 6      | 8      |
| 8.  | Golongan II/d  | 1         | 1      | 2      |
| 9.  | Golongan II/c  | 4         | -      | 4      |
| 10. | Golongan II/b  | -         | -      | -      |
| 11. | Golongan II/a  | -         | -      | -      |
| 12. | Golongan I/c   | -         | -      | -      |
|     | Jumlah         | 19        | 15     | 34     |

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan serta mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPRD.

Saat ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan operasional, antara lain:

- Gedung Kantor DPRD sebagai pusat kegiatan kedewanan dan sekretariat, termasuk ruang rapat paripurna, ruang komisi, ruang fraksi, dan ruang alat kelengkapan DPRD.

- Perlengkapan perkantoran, seperti meja kerja, kursi, lemari arsip, komputer, printer, mesin fotokopi, dan perangkat teknologi informasi lainnya.
- Ruang kerja pimpinan dan anggota DPRD yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang kegiatan.
- Kendaraan dinas operasional, baik untuk pimpinan DPRD maupun untuk kegiatan sekretariat.
- Perangkat dokumentasi dan multimedia, seperti kamera, alat perekam, dan sistem audio visual untuk mendukung dokumentasi rapat-rapat DPRD.
- Akses jaringan internet dan perangkat server, untuk menunjang layanan administrasi dan komunikasi digital.

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis dalam Renstra 2025–2029, Sekretariat DPRD memerlukan penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana, seperti:

1. Modernisasi sistem informasi kesekretariatan dan e-legislasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi.
2. Peremajaan peralatan kantor dan sistem teknologi informasi, agar pelayanan bersifat digital, cepat, dan terintegrasi.
3. Peningkatan kapasitas ruang kerja dan ruang rapat, menyesuaikan dengan dinamika tugas kedewanan dan jumlah anggota dewan.
4. Peningkatan kualitas fasilitas publik dan pendukung, seperti ruang tunggu tamu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas kebersihan dan keamanan.
5. Penyediaan sarana kendaraan dinas dan operasional yang memadai dan layak guna, untuk mendukung kegiatan dalam dan luar daerah

#### c. Keuangan

Pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu aspek krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara optimal. Keuangan yang dikelola mencakup seluruh pembiayaan kegiatan operasional kesekretariatan dan fasilitasi kegiatan DPRD.

##### 1. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan Sekretariat DPRD bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Dana transfer dari pemerintah pusat (jika relevan untuk program tertentu).
- Sumber-sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### 2. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan meliputi:

- Belanja Operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan fasilitas.
- Belanja Modal, untuk pengadaan sarana dan prasarana baru atau pengembangan infrastruktur yang mendukung tugas-tugas DPRD.
- Belanja Kegiatan Fasilitas DPRD, seperti rapat paripurna, reses, kunjungan kerja, Bimtek (Bimbingan Teknis), serta kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
- Belanja Perjalanan Dinas, baik dalam daerah maupun luar daerah, untuk mendukung pelaksanaan fungsi representatif dan pengawasan anggota DPRD.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Keterbatasan anggaran akibat keterbatasan fiskal daerah, yang dapat berdampak pada pelaksanaan program prioritas DPRD.
- Kebutuhan akan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan prinsip good governance.
- Penyesuaian terhadap sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik, seperti penggunaan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

#### Arah Pengembangan dan Strategi Keuangan

Dalam rangka mendukung visi Renstra 2025–2029, strategi keuangan diarahkan pada:

- Peningkatan efisiensi belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai dengan skala prioritas.
- Penguatan akuntabilitas dan transparansi keuangan, melalui pelaporan berbasis kinerja.
- Pengembangan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, melalui pelatihan dan sertifikasi.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Renstra Periode 2025 - 2029

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pada umumnya, kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Anggota DPRD dan pihak lain yang berkepentingan selama lima tahun terakhir secara relatif terus mengalami peningkatan.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD mencerminkan sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam mendukung kelancaran fungsi kelembagaan DPRD. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan dilakukan untuk mengetahui capaian target program, hambatan yang dihadapi, serta peluang peningkatan kualitas layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD maupun masyarakat.

Capaian Kinerja Pelayanan (2020–2024)

Selama periode Renstra sebelumnya, beberapa indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai antara lain:

- Tingkat kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat DPRD meningkat berkat dukungan fasilitas rapat dan jadwal yang terkoordinasi baik.
- Kegiatan reses dan kunjungan kerja DPRD terlaksana sesuai jadwal, dengan dukungan administrasi dan logistik dari Sekretariat.
- Layanan surat-menyurat dan dokumentasi kedewanan berjalan secara teratur dan terdigitalisasi sebagian.
- Pelaporan keuangan DPRD secara umum memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bersama dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- Tingkat kepuasan internal anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat dinilai cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

Adapun kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disampaikan dengan memperhatikan Laporan Kinerja sebagai berikut :

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode        |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | 91 ≤ 100                         | Sangat Baik                          | Hijau Tua   |
| 2.  | 76 ≤ 90                          | Tinggi                               | Hijau Muda  |
| 3.  | 66 ≤ 75                          | Sedang                               | Kuning Tua  |
| 4.  | 51 ≤ 65                          | Rendah                               | Kuning Muda |
| 5.  | ≤ 50                             | Sangat Rendah                        | Merah       |

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran                                        | Indikator/Meta Indikator                                                                                                                      | Satuan | 2024   |           |             |               | Target Akhir RPJMD |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|---------------|--------------------|
|    |                                                |                                                                                                                                               |        | Target | Realisasi | % Realisasi | Kriteria/Kode |                    |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD. | Indikator : Indeks Kepuasan Pelayanan<br><br>Meta Indikator : Persentase Hasil Survey ke 35 Anggota DPRD dibagi target tahun 2024 di kali 100 | %      | 90     | 89,67     | 99,63       | Sangat Baik   | 92%                |

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 90% hasil dari survey terhadap kepuasan layanan terhadap 35 Orang anggota DPRD yang dilaksanakan diakhir Tahun 2024 adalah sebesar 89,67% dengan demikian meta Indikator Sasaran kinerja dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD adalah :

Realisasi

89.67

Target

$x\ 100 = 90,00\ x\ 100 = 99.63\%$

Dapat dilihat Pada Tabel diatas, target Sasaran Indikator Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 90% dengan realisasi pencapaian kinerja atas Sasaran Indikator Indeks kepuasan layanan terhadap Anggota DPRD adalah sebesar 89,67% dengan persentase realisasi sebesar 99,63% dengan kriteria Sangat baik, maka target tahun 2024 “Tercapai”.

Pada umumnya, kualitas pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Anggota DPRD dan pihak lain yang berkepentingan selama lima tahun terakhir secara relatif terus mengalami peningkatan.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD mencerminkan sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dalam mendukung kelancaran fungsi kelembagaan DPRD. Evaluasi terhadap kinerja pelayanan dilakukan untuk mengetahui capaian target program, hambatan yang dihadapi, serta peluang peningkatan kualitas layanan kepada pimpinan dan anggota DPRD maupun masyarakat.

Selama periode Renstra sebelumnya, beberapa indikator kinerja pelayanan yang telah dicapai antara lain:

- **Tingkat kelancaran penyelenggara rapat-rapat DPRD** meningkat berkat dukungan fasilitasi rapat dan jadwal yang terkoordinasi baik.
- **Kegiatan reses dan kunjungan kerja DPRD terlaksana sesuai jadwal**, dengan dukungan administrasi dan logistik dari secretariat

- **Layanan surat-menyurat dan dokumentasi kedewanan** berjalan secara teratur dan terdigitalisasi Sebagian
- **Pelapor keuangan DPRD secara umum memperoleh opini WTP** (Wajar Tanpa Pengecualian) Bersama dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Tingkat kepuasan internal anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat dinilai cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD

- Sebagai penerima utama layanan administratif, fasilitasi, dan penyediaan sarana serta prasarana dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Adapun daftar nama Anggota DPRD KabupatenTanjung Jabung Barat periode 2024-2029 adalah

NAMA ANGGOTA DPRD KAB. TANJUNG  
JABUNG BARAT PERIODE 2024-2029

| No. | NAMA                       | JABATAN          | KET L/P |
|-----|----------------------------|------------------|---------|
| 1   | HAMDANI, SE                | KETUA DPRD       | L       |
| 2   | HASAN BASYRI HARAHAHAP, SH | WAKIL KETUA DPRD | L       |
| 3   | MUH.SJAFRIL.S              | WAKIL KETUA DPRD | L       |
| 4   | H ABDULLAH, SE             | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 5   | ANSARI                     | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 6   | JAYUS                      | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 7   | DEDI HADI, SH              | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 8   | ERLIANI                    | ANGGOTA DPRD     | P       |
| 9   | H. FAHRIZAL, S.PD          | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 10  | JAMAL DARMAWAN SIE, SE,MM  | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 11  | MARIATUL KIFTIAH           | ANGGOTA DPRD     | P       |
| 12  | MUHAMMAD ZAKI, ST          | ANGGOTA DPRD     | L       |
| 13  | NURKHOLIS, ST              | ANGGOTA DPRD     | L       |

|                 |                                  |              |   |
|-----------------|----------------------------------|--------------|---|
| 14 <sup>2</sup> | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN, SH | ANGGOTA DPRD | L |
| 15              | SUTEJO                           | ANGGOTA DPRD | L |
| 16              | HASMELY HASAN                    | ANGGOTA DPRD | L |
| 17              | ISHAK                            | ANGGOTA DPRD | L |
| 18              | SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP         | ANGGOTA DPRD | L |
| 19              | WILDAWATI, SH                    | ANGGOTA DPRD | P |
| 20              | HASSEK                           | ANGGOTA DPRD | L |
| 21              | QBAL                             | ANGGOTA DPRD | L |
| 22              | TAMSIR                           | ANGGOTA DPRD | L |
| 23              | LUKAS CHOLIKUL. R                | ANGGOTA DPRD | L |
| 24              | DUDI PURWADI                     | ANGGOTA DPRD | L |
| 25              | YETNO                            | ANGGOTA DPRD | L |
| 26              | SITI MAIDINA HERDIYANTI          | ANGGOTA DPRD | P |
| 27              | AUGUSTINUS SIAHAAN               | ANGGOTA DPRD | L |
| 28              | MELDA ARISANDI                   | ANGGOTA DPRD | P |
| 29              | TUMIRIN                          | ANGGOTA DPRD | L |
| 30 <sup>3</sup> | DEDY IRAWAN                      | ANGGOTA DPRD | L |
| 31              | DONI IDRIS SARAGIH               | ANGGOTA DPRD | L |
| 32              | HERY SAPUTRA                     | ANGGOTA DPRD | L |
| 33              | ENDRI AVIAN                      | ANGGOTA DPRD | L |
| 34              | AHMAD HANIF                      | ANGGOTA DPRD | L |
| 35              | ALBERT CHANIAGO                  | ANGGOTA DPRD | L |

## 2. Alat Kelengkapan DPRD (AKD)

- o Meleputi Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan yang memerlukan dukungan administratif dan teknis dalam menjalankan tugasnya.

Berikut daftar Kelengkapan DPRD (AKD)

- Fraksi-fraksi

| FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT |                                |             | FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |                               |             |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
|                                 |                                |             |                                      |                               |             |
| NO                              | NAMA                           | Jabatan     | NO                                   | NAMA                          | Jabatan     |
| 1.                              | AHMAD HANIF, S.Sy.,M.H.        | Ketua       | 1.                                   | SUTEJO, S.M.                  | Ketua       |
| 2.                              | MELDA ARISANDI, S.Kom.         | Wakil Ketua | 2.                                   | Hj. ERLIANI                   | Wakil Ketua |
| 3.                              | TUMIRIN                        | Sekretaris  | 3.                                   | H. ASSEK, SE                  | Sekretaris  |
| 4.                              | HASAN BASYRI HARAHAP, S.H.     | Anggota     | 4.                                   | H. TAMSIR                     | Anggota     |
| 5.                              | YETNO                          | Anggota     |                                      |                               |             |
| FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA    |                                |             | FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA     |                               |             |
|                                 |                                |             |                                      |                               |             |
| NO                              | NAMA                           | Jabatan     | NO                                   | NAMA                          | Jabatan     |
| 1.                              | DEDI HADI, S.H                 | Ketua       | 1                                    | MUHAMMAD ZAKI, S.T.           | Ketua       |
| 2.                              | ISHAK                          | Wakil Ketua | 2                                    | WILDAWATI, S.H.               | Wakil Ketua |
| 3.                              | SYUPPRAYOGI SAIFUL, S.I.P. M.H | Sekretaris  | 3                                    | ANSARI                        | Sekretaris  |
| 4.                              | NURKHOLIS, S.T.                | Anggota     | 4                                    | JAYUS, S.E.                   | Anggota     |
|                                 |                                |             | 5                                    | JAMAL DARMAWAN SIE, S.E., M.M | Anggota     |
|                                 |                                |             | 6                                    | HERY SAPUTRA, S.H.            | Anggota     |
| FRAKSI KEADILAN PEMBANGUNAN     |                                |             |                                      |                               |             |
|                                 |                                |             |                                      |                               |             |
| NO                              | NAMA                           | Jabatan     |                                      |                               |             |
| 1                               | H.FAHRIZAL, S.Pd               | Ketua       |                                      |                               |             |
| 2                               | ENDRI AVIAN                    | Sekretaris  |                                      |                               |             |
| 3                               | MARIATUL KIFTIAH               | Anggota     |                                      |                               |             |

- Komisi-Komisi

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
KOMISI II DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEHATAN

| NO  | NAMA                                  | JABATAN     | ASAL FRAKSI                 |
|-----|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1.  | SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.I.P. M.H        | Ketua       | FRAKSI GOLKAR               |
| 2.  | SITI MAIDINA HERDIYANTI, S. IP., M.IP | Wakil Ketua | FRAKSI PAN                  |
| 3.  | JAYUS, S.E                            | Sekretaris  | FRAKSI PKB                  |
| 4.  | IQBAL                                 | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 5.  | DONI IDRIS SARAGIH ,S.Pd.             | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 6.  | DEDY IRAWAN, S.H.                     | Anggota     | FRAKSI PAN                  |
| 7.  | MELDA ARISANDI, S.Kom.                | Anggota     | FRAKSI NASDEM               |
| 8.  | Hj. ERLIANI                           | Anggota     | FRAKSI GERINDRA             |
| 9.  | H. TAMSIR                             | Anggota     | FRAKSI GERINDRA             |
| 10. | HERY SAPUTRA, S.H.                    | Anggota     | FRAKSI PKB                  |
| 11. | ENDRI AVIAN, S.H.                     | Anggota     | FRAKSI KEADILAN PEMBANGUNAN |

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
KOMISI I DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN PENDIDIKAN**

| NO | NAMA                                   | JABATAN     | ASAL FRAKSI                 |
|----|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | H. ASSEK, S.E                          | Ketua       | FRAKSI GERINDRA             |
| 2. | AUGUSTINUS SIAHAAN, S.H.               | Wakil Ketua | FRAKSI PAN                  |
| 3. | NURKHOLIS, S.T.                        | Sekretaris  | FRAKSI GOLKAR               |
| 4. | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN,S.H.,M.H. | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 5. | H.ABDULLAH,SE                          | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 6. | YETNO                                  | Anggota     | FRAKSI NASDEM               |
| 7. | ANSARI                                 | Anggota     | FRAKSI PKB                  |
| 8. | WILDAWATI, SH                          | Anggota     | FRAKSI PKB                  |
| 9. | MARIATUL KIFTIAH                       | Anggota     | FRAKSI KEADILAN PEMBANGUNAN |

**SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
KOMISI III DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

| NO  | NAMA                          | JABATAN     | ASAL FRAKSI                 |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1.  | ALBERT CHANIAGO, S. P.        | Ketua       | FRAKSI PAN                  |
| 2.  | ISHAK                         | Wakil Ketua | FRAKSI GOLKAR               |
| 3.  | MUHAMMAD ZAKI, S.T            | Sekretaris  | FRAKSI PKB                  |
| 4.  | DUDI PURWADI,S.E.I.           | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 5.  | HASMELY HASAN, SH             | Anggota     | FRAKSI PDI-PERJUANGAN       |
| 6.  | LUKAS CHOLIKUL. R.            | Anggota     | FRAKSI PAN                  |
| 7.  | AHMAD HANIF, S.Sy.,M.H.       | Anggota     | FRAKSI NASDEM               |
| 8.  | TUMIRIN                       | Anggota     | FRAKSI NASDEM               |
| 9.  | SUTEJO, S.M.                  | Anggota     | FRAKSI GERINDRA             |
| 10. | DEDI HADI, S.H                | Anggota     | FRAKSI GOLKAR               |
| 11. | JAMAL DARMAWAN Sic, S.E, M.M. | Anggota     | FRAKSI PKB                  |
| 12. | H. FAHRIZAL, S. Pd            | Anggota     | FRAKSI KEADILAN PEMBANGUNAN |

- Badan Musyawarah

| BADAN MUSYAWARAH DPRD |                                        |                               |                        | BADAN ANGGARAN DPRD |                               |                               |                        |
|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| NO                    | NAMA                                   | Jabatan                       | ASAL FRAKSI            | NO                  | NAMA                          | Jabatan                       | ASAL FRAKSI            |
| 1                     | HAMDANI, S.E.                          | Ketua Merangkap Anggota       | F- PDL P               | 1                   | HAMDANI, S.E.                 | Ketua Merangkap Anggota       | F- PDL P               |
| 2                     | H.MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H.          | Wakil Ketua Merangkap Anggota | F- PAN                 | 2                   | H.MUH. SJAFRIL SIMAMORA, S.H. | Wakil Ketua Merangkap Anggota | F- PAN                 |
| 3                     | HASAN BASYRI KARAHAAP, S.H.            | Wakil Ketua Merangkap Anggota | F-NASDEM               | 3                   | HASAN BASYRI KARAHAAP, S.H.   | Wakil Ketua Merangkap Anggota | F-NASDEM               |
| 4                     | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN,S.H.,M.H. | Anggota                       | F- PDL P               | 4                   | HASMELY HASAN, SH             | Anggota                       | F- PDL P               |
| 5                     | DONI IDRIS SARAGIH ,S.Pd.              | Anggota                       | F- PDL P               | 5                   | DUDI PURWADIS.E.I.            | Anggota                       | F- PDL P               |
| 6                     | SITI MAIDINA HERDIYANTI, S. IP.,M.IP   | Anggota                       | F- PAN                 | 6                   | IQBAL                         | Anggota                       | F- PDL P               |
| 7                     | DEDY IRAWAN, S.H.                      | Anggota                       | F- PAN                 | 7                   | ALBERT CHANIAGO, S. P.        | Anggota                       | F- PAN                 |
| 8                     | MELDA ARISANDI, S.Kom.                 | Anggota                       | F-NASDEM               | 8                   | AUGUSTINUS SLAHAAN, S.H.      | Anggota                       | F- PAN                 |
| 9                     | Hj. ERLIANI                            | Anggota                       | F-GERINDRA             | 9                   | AHMAD HANIF, S.Sy.,M.H.       | Anggota                       | F-NASDEM               |
| 10                    | H. TAMSIR                              | Anggota                       | F-GERINDRA             | 10                  | TUMIRIN                       | Anggota                       | F-NASDEM               |
| 11                    | ISHAK                                  | Anggota                       | F-GOLKAR               | 11                  | SUTEJO, S.M.                  | Anggota                       | F-GERINDRA             |
| 12                    | NURKHOLIS, S.T.                        | Anggota                       | F-GOLKAR               | 12                  | H. ASSEK, S.E                 | Anggota                       | F-GERINDRA             |
| 13                    | JAYUS, S.E.                            | Anggota                       | F-PKB                  | 13                  | DEDI HADI, S.H                | Anggota                       | F-GOLKAR               |
| 14                    | WILDAWATI, S.H.MH                      | Anggota                       | F-PKB                  | 14                  | SYUFRAYOGI SYAIFUL, SLP, M.H  | Anggota                       | F-GOLKAR               |
| 15                    | HERY SAPUTRA, S.H.                     | Anggota                       | F-PKB                  | 15                  | MUHAMMAD ZAKI, S.T.           | Anggota                       | F-PKB                  |
| 16                    | ENDRI AVIAN, S.H.                      | Anggota                       | F-KEADILAN PEMBANGUNAN | 16                  | ANSARI                        | Anggota                       | F-PKB                  |
| 17                    | MARIATUL KIPTIAH                       | Anggota                       | F-KEADILAN PEMBANGUNAN | 17                  | JAMAL DARMAWAN Sie, S.E,M.M   | Anggota                       | F-PKB                  |
| 18                    | SEKRETARIS DPRD                        | Sekretaris bukan Anggota      | -                      | 18                  | H.FAHRIZAL, S.Pd              | Anggota                       | F-KEADILAN PEMBANGUNAN |
| 19                    | SEKRETARIS DPRD                        | Sekretaris bukan Anggota      | -                      | 19                  | SEKRETARIS DPRD               | Sekretaris bukan Anggota      | -                      |

| BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD |                                        |                          |                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| NO                                      | NAMA                                   | Jabatan                  | ASAL FRAKSI            |
| 1                                       | JAMAL DARMAWAN Sw, S.E, M.M.           | Ketua                    | F-PKB                  |
| 2                                       | DEDY IRAWAN, S.H.                      | Wakil Ketua              | F- PAN                 |
| 3                                       | DUDI PURWADIS.E.I.                     | Anggota                  | F- PDL P               |
| 4                                       | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN,S.H.,M.H. | Anggota                  | F- PDL P               |
| 5                                       | SITI MAIDINA HERDIYANTI, S. IP., M.IP  | Anggota                  | F- PAN                 |
| 6                                       | AHMAD HANIF, S.Sy.,M.H.                | Anggota                  | F-NASDEM               |
| 7                                       | TUMIRIN                                | Anggota                  | F-NASDEM               |
| 8                                       | H. ASSEK, S.E                          | Anggota                  | F-GERINDRA             |
| 9                                       | DEDI HADI, S.H                         | Anggota                  | F-GOLKAR               |
| 10                                      | HERY SAPUTRA, S.H                      | Anggota                  | F-PKB                  |
| 11                                      | ENDRI AVIAN, S.H.                      | Anggota                  | F-KEADILAN PEMBANGUNAN |
| 12                                      | SEKRETARIS DPRD                        | Sekretaris bukan Anggota | -                      |

| BADAN KEHORMATAN DPRD |                    |             |                        |
|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| NO                    | NAMA               | Jabatan     | ASAL FRAKSI            |
| 1                     | H. FAHRIZAL, S. Pd | Ketua       | F-KEADILAN PEMBANGUNAN |
| 2                     | LUKAS CHOLIKUL, R. | Wakil Ketua | F- PAN                 |
| 3                     | H.ABDULLAH,SE      | Anggota     | F- PDL P               |
| 4                     | YETNO              | Anggota     | F-NASDEM               |
| 5                     | Hj. ERLIANI        | Anggota     | F-GERINDRA             |

### 3. Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sebagai penerima manfaat tidak langsung dari kegiatan DPRD, khususnya dalam perumusan kebijakan daerah yang aspiratif dan akuntabel

| DAFIL                                                           | NO | PIMPINAN/ANGGOTA DPRD            |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|
| DAFIL I<br>TUNGKAL<br>ILIR, BRAM<br>ITAM,<br>SEBERANG<br>KOTA   | 1  | MUH.SJAFRIL SIMAMORA             |
|                                                                 | 2  | ERLIANI                          |
|                                                                 | 3  | JAMAL DARMAWAN SIE, SE,MM        |
|                                                                 | 4  | MARIATUL KIFTIAH                 |
|                                                                 | 5  | MUHAMMAD ZAKI, ST                |
|                                                                 | 6  | HASMELY HASAN                    |
|                                                                 | 7  | SYUFRAYOGI SYAIFUL, S.IP         |
|                                                                 | 8  | SITI MAIDINA HERDIYANTI          |
|                                                                 | 9  | HERY SAPUTRA                     |
|                                                                 | 10 | ENDRI AVIAN                      |
|                                                                 | 11 | AHMAD HANIF                      |
| DAFIL II<br>BETARA,<br>KUALA<br>BETARA                          | 1  | HASAN BASYRI HARAHAAP, SH        |
|                                                                 | 2  | H ABDULLAH, SE                   |
|                                                                 | 3  | DEDI HADI, SH                    |
|                                                                 | 4  | TAMSIR                           |
|                                                                 | 5  | ALBERT CHANIAGO                  |
| DAFIL III<br>MERLUNG,<br>MUARA<br>PAPALIK,<br>RENAH             | 1  | NURKHOLIS, ST                    |
|                                                                 | 2  | WILDAWATI, SH                    |
|                                                                 | 3  | DUDI PURWADI                     |
|                                                                 | 4  | YETNO                            |
|                                                                 | 5  | DONI IDRIS SARAGIH               |
| DAFIL IV<br>TUNGKAL<br>ULU, TEBING<br>TINGGI,<br>BATANG<br>ASAM | 1  | HAMDANI, SE                      |
|                                                                 | 2  | JAYUS                            |
|                                                                 | 3  | H. FAHRIZAL, S.PD                |
|                                                                 | 4  | SATRIA TUBAGUS RYAN HERMAWAN, SH |
|                                                                 | 5  | SUTEJO                           |
|                                                                 | 6  | ISHAK                            |
|                                                                 | 7  | AUGUSTINUS SIAHAAN               |
|                                                                 | 8  | MELDA ARISANDI                   |
|                                                                 | 9  | DEDY IRAWAN                      |
| DAFIL V<br>PENGABUAN,<br>SENYERANG                              | 1  | ANSARI                           |
|                                                                 | 2  | H ASSEK                          |
|                                                                 | 3  | IQBAL                            |
|                                                                 | 4  | LUKAS CHOLIKUL. R                |
|                                                                 | 5  | TUMIRIN                          |

#### 4. Perangkat Daerah

- o Sebagai mitra kerja DPRD yakni : Bappeda, BKAD, Bagian Hukum Setda Tanjab Barat, Inspektorat dan Bappenda yang membutuhkan koordinasi dan fasilitasi dalam proses pembahasan program/kegiatan, laporan pertanggungjawaban, dan kebijakan anggaran daerah.

#### 5. Instansi Vertikal dan Lembaga Non-Pemerintah

- o Sebagai mitra strategis dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan DPRD melalui kerja sama, konsultasi, serta harmonisasi kebijakan dan aspirasi masyarakat.

### 2.5 Permasalahan Pelayanan dan Isu strategis Perangkat Daerah

#### Identifikasi Permasalahan

Pada umumnya Organisasi kini menghadapi satu dinamika dan lingkungan yang sedang berubah secara terus menerus, sehingga Organisasi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut, perubahan-perubahan tersebut karena adanya kekuatan-kekuatan Internal dan Eksternal yang mendorong Organisasi untuk merencanakan perubahan dengan tujuan untuk memperbaiki kemampuan Organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan untuk merubah perilaku pekerja aparat dalam proses perubahan tersebut.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagai organisasi Birokrasi akan dipengaruhi oleh beberapa Faktor Internal dan Eksternal serta Perubahan –perubahan yang terjadi, sehingga menjadi satu tuntutan bagi Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk merumuskan dan mengelola perubahan melalui pengembangan organisasi sebagai suatu kekuatan untuk mengantisipasi perubahan Eksternal dan meminimalisasi terjadi penolakan terhadap perubahan baik penolakan perorangan dikarenakan kebiasaan yang telah mengakar, keamanan akan posisi jabatan/pekerjaan individu terhadap hal yang tidak diketahui maupun penolakan Organisasi dikarenakan ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuatan yang dibangun, serta adanya ancaman terhadap alokasi sumberdaya yang dibangun.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkaitan erat dengan reposisi dan refungsionalisasi DPRD sebagai badan legislative daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagai Implikasi dari amanat Undang-undang Otonomi daerah tentang Pentingnya pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Prakarsa dan Kreativitas peningkatan peran Masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai perangkat daerah pendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, menjadi Instrument kelembagaan yang sangat penting bagi DPRD agar dapat melaksanakan semua tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, oleh karena itu Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menetapkan suatu strategi pengembangan secara kontiniu dan meningkatkan kapasitas propesionalisme sumberdaya Aparatur yang memahami berbagi peraturan dan prosedur administrasi dan majeterial yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagi fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substansi dan sumber inspirasi bagi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran publiknya sebagai wakil rakyat.

Sejalan itu ada permasalahan yang teridentifikasi dan tantangan dalam menjalani tugas dan fungsi, yaitu :

- a. sebaran tenaga aparatur Sekretariat yang memiliki kemampuan propesional dan mempunyai kompetensi yang memadai belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatn teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia
- d. Masih belum terbangunya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan Organisasi social masyarakat, organisasi pemuda dan LSM
- e. Seringnya terjadi perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah
- f. Masih rendahnya peran tenaga ahli dalam membantu peningkatan kinerja kedewanan

Tabel 2

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

| Aspek Kajian           | Capaian/Kondisi saat ini                         | Standar yang digunakan | Faktor yang mempengaruhi                 |                                                           | Permasalahan Pelayanan OPD                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                  |                        | Internal (Kewenangan OPD)                | Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)                         |                                                                               |
| Gambaran Pelayanan OPD | Pelayanan tugas/fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD | Capaian Persentase     | Tersediannya Anggaran yang cukup memadai | Pesatnya perkembangan sarana dan Informasi dan Komunikasi | Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi yang tersedia |
|                        |                                                  |                        | Tersedianyan kerjasama dengan            | Meningkatnya kesadaran masyarakat                         | Belum optimalnya pemanfaatan Sapras                                           |

|  |  |  |                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | lembaga/instansi terkait dalam peningkatan pengembangan SDM pegawai | terhadap kehidupan yang demokratis                                                                           | pendukung tugas dan Fungsi DPRD                                                                               |
|  |  |  | Tersedianya SOP dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD | Meningkatkan tuntunan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public | Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan public                   |
|  |  |  |                                                                     | Pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung kinerja DPRD                                                         | Sering terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah |

2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

- Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesekretariatan DPRD

Tuntutan terhadap layanan kesekretariatan yang cepat, akurat, dan profesional semakin meningkat, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Sekretariat perlu terus meningkatkan efisiensi administrasi dan tata kelola layanan.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Fungsi Kedewanan

Masih terdapat keterbatasan dalam fasilitas fisik maupun teknologi informasi yang berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas DPRD. Modernisasi dan peremajaan sarana mutlak diperlukan untuk mendukung digitalisasi pelayanan.

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Tingkat kompetensi dan profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan agar mampu menjawab tuntutan pelayanan kedewanan yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

- Peningkatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Administrasi

Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan surat-menyurat, dokumentasi, dan jadwal kegiatan DPRD menjadi tantangan yang harus diatasi melalui pengembangan aplikasi dan sistem kerja digital.

- Tuntutan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan DPRD

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran DPRD, baik untuk operasional sekretariat maupun fasilitasi anggota dewan.

- Dinamika Politik dan Aspirasi Masyarakat yang Terus Berkembang

Perubahan konstelasi politik, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta tuntutan publik terhadap kinerja DPRD mendorong Sekretariat untuk lebih adaptif, komunikatif, dan responsif terhadap dinamika tersebut.

- Sinkronisasi Program Sekretariat DPRD dengan RPJMD dan Prioritas Daerah

Masih diperlukan penguatan dalam hal penyelarasan program dan kegiatan Sekretariat DPRD dengan arah kebijakan pembangunan daerah agar pelaksanaan program lebih efektif, terarah, dan memiliki dampak nyata.

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD        | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                 | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  | ISU STRATEGIS PD                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | GLOBAL                                                                                                                     | NASIONAL                                                                                                                                 | REGIONAL                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                               | 4                                                                                                                          | 5                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                    |
| Potensi Kelembagaan DPRD yang Kuat dan Responsif | <ul style="list-style-type: none"><li>• Waktu penyusunan perencanaan penganggaran yang tidak sesuai dengan penyusunan Renja DPRD.</li><li>• Penyampaian laporan/dokumen yang diperlukan dalam pembahasan di DPRD yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah terkait masih sering mendekati deadline</li><li>• waktu yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku</li><li>• Hasil rapat pembahasan alat kelengkapan DPRD berupa catatan hasil rapat maupun risalah belum terdokumentasi secara baik dari sisi efisiensi waktu salah satunya disebabkan masih kurangnya SDM.</li></ul> | Rendahnya integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam produk hukum daerah | <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan peran DPRD dalam pengawasan dan pembentukan regulasi daerah yang berkualitas</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tingginya aspirasi masyarakat terhadap pembangunan yang adil dan merata</li><li>• Kondisi geografis dan potensi sumber daya alam yang kompleks</li></ul> | Kebutuhan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesekretariatan dalam menunjang fungsi DPRD |

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada analisis terhadap dinamika internal dan eksternal serta masukan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, visi pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025–2029, yaitu: “MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH MADANI” dan misi yang ditetapkan yaitu “TANJUNG JABUNG BARAT YANG BERKUALITAS, MAJU, RELIGIUS, KOMPETITIF, AMAN, HARMONIS DAN MANDIRI BERINOVASI”. Makna dari visi tersebut mencerminkan arah pembangunan daerah dengan menekankan beberapa aspek utama yang ingin dicapai dalam periode kepemimpinan tertentu. Berikut adalah makna dari setiap kata kunci dalam visi tersebut:

#### 1. Berkualitas

- Mengacu pada peningkatan kualitas di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.
- Pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan standar hidup masyarakat.

#### 2. Maju

- Pembangunan daerah yang progresif di berbagai bidang, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan teknologi.
- Peningkatan daya saing daerah agar sejajar dengan daerah lain yang lebih berkembang.

#### 3. Religius

- Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
- Pemerintah daerah yang mendukung kebijakan berbasis nilai-nilai moral dan spiritual.

#### 4. Kompetitif

- Masyarakat dan daerah yang memiliki daya saing tinggi, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.
- Perekonomian yang berbasis keunggulan daerah, inovasi, dan produktivitas tinggi.

#### 5. Aman

- Lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari konflik, serta terjamin keamanan dan ketertiban masyarakatnya.
- Pemerintah daerah yang mampu menjaga stabilitas keamanan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

#### 6. Harmonis

- Kehidupan masyarakat yang rukun dan damai dalam keberagaman suku, agama, dan budaya.
- Hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.

#### 7. Mandiri Berinovasi

- Kemandirian dalam pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pusat atau pihak lain.
- Kemampuan menciptakan solusi kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan dan ekonomi.

Visi ini mencerminkan harapan agar Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkembang secara holistik, tidak hanya dalam aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dalam aspek sosial, spiritual, dan keamanan.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan Misi Pembangunan Tanjung Jabung Barat Periode 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna menciptakan SDM yang unggul dan berakhlak, serta mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.
2. Mengembangkan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan Membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi potensi lokal berbasis keberlanjutan.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.
5. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib, dan Demokratis Membangun kehidupan sosial yang harmonis dan demokratis melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarwarga.
6. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dari Desa hingga Kota Melaksanakan pembangunan yang adil dan merata, memastikan bahwa seluruh wilayah, baik desa maupun kota, mendapatkan perhatian dan pembangunan yang seimbang.

Berdasarkan tugas pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah pelaksanaan misi ke 4 yaitu : ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.***

Untuk mendukung Misi tersebut di atas, Sekretariat DPRD mempunyai Tujuan sebagai berikut

1. Peningkatan Pelayanan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Mendorong peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk mewujudkan Misi ke 4 dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tersebut di atas, maka akan dilaksanakan melalui Program-program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu :

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Dengan Aksi Substansi :

1. Pembentukan PERDA dan Peraturan DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Peningkatan Kapasitas DPRD
4. Penyerapan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
5. Fasilitasi Tugas DPRD dalam pembentukan Peraturan daerah
6. Fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan
7. Penyampaian Informasi dan Publikasi kegiatan DPRD

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada sasaran dan indikator kinerja Sasaran.

Dengan berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tahun 2025-2029 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Tujuan  
MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
- b. Sasaran  
Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD

3.2 Strategi dalam Mencapai Tujuan, Sasaran Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

“Penentuan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Misi Ke-4 RPJMD 2025–2029 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas. Tujuan utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD, dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan kepada DPRD.”

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029), maka strategi-strategi dan kebijakan yang akan diterapkan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran                                           | Strategi                                                                                                                                          | Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD. | 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD<br>2. Peningkatan Disiplin Aparatur.<br>3. Peningkatan pelayanan Administrasi perkantoran dan keuangan. | 1. Memfasilitasi pimpinan dan anggota untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman yg luas dalam pelaksanaan tugasnya<br>2. Menyediakan materi dan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait dengan tugas dan fungsi DPRD.<br>3. Menyediakan seragam dinas beserta perlengkapannya bagi seluruh aparatur<br>4. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan<br>5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan<br>6. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan SDM dalam pelayanan. |

TABEL 3.3.1 TUJUAN DAN SASARAN (RENSTRA) PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                 | TUJUAN                                                         | SASARAN                                                                  | INDIKATOR                                                         | BASELINE 2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------------|
|                                                                     |                                                                |                                                                          |                                                                   |               | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |            |
| (01)                                                                | (02)                                                           | (03)                                                                     | (04)                                                              | (05)          | (06)         | (07) | (08) | (09) | (10) | (11) | (12)       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT |                                                                |                                                                          |                                                                   |               |              |      |      |      |      |      |            |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                | MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD                            | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks) | 89,67         | 90           | 90,5 | 91   | 91,5 | 92   | 92,5 |            |
|                                                                     |                                                                | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah | Nilai AKIP OPD (*)                                                | 80,41         | 81,5         | 82   | 82,5 | 83   | 83,5 | 84   |            |

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperlukan suatu tahapan pembangunan yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penahapan pembangunan ini menjadi bagian penting dari proses perencanaan jangka menengah untuk memastikan bahwa target-target strategis dapat dicapai secara bertahap melalui prioritas pembangunan tahunan. Dengan penahapan yang tepat, pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih fokus, terarah, serta selaras dengan kapasitas fiskal daerah, kondisi organisasi, kebutuhan layanan kesekretariatan DPRD, serta dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

Setiap tahapan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan logis antara tujuan perangkat daerah, sasaran, indikator, serta target tahunan yang ingin dicapai hingga akhir periode RENSTRA. Oleh karena itu, penyusunan penahapan tidak dilakukan secara parsial, tetapi mengikuti alur kebijakan yang berkesinambungan dan integratif, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penahapan ini juga memberikan ruang adaptif terhadap perubahan regulasi nasional/daerah, perkembangan teknologi informasi yang menjadi basis digitalisasi layanan kesekretariatan, serta kondisi politik dan organisasi yang dapat mempengaruhi dinamika kerja DPRD.

Selain itu, penahapan pembangunan tahunan berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD, yang berperan sebagai acuan dalam penganggaran berbasis kinerja. Dengan menetapkan prioritas tahunan yang jelas dan realistis, Sekretariat DPRD dapat lebih mudah melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan, sekaligus memastikan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penguatan Indeks Kepuasan DPRD (IKD), capaian AKIP OPD, serta pelaksanaan survei kepuasan berbasis data. Penahapan kinerja tahunan ini juga mendorong pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata dalam mendukung tugas-tugas DPRD. Adapun penahapan target kinerja Renstra sebagaimana tabel 3.3.2 sebagai berikut

Tabel 3.3.2 Penahapan RENSTRA Sekretariat DPRD 2025–2029

| TAHAP I<br>2025                                                                                                                                                  | TAHAP II<br>2026                                                                                                                                                          | TAHAP III<br>2027                                                                                                                                     | TAHAP IV<br>2028                                                                                         | TAHAP V<br>2029                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                        | 5                                                                                                                                            |
| Penguatan tata kelola layanan kesekretariatan DPRD; penyusunan SOP layanan persidangan dan administrasi; identifikasi kebutuhan digitalisasi dokumen legislatif. | Penguatan sarana prasarana penunjang layanan DPRD; peningkatan kualitas layanan administrasi dan penyusunan laporan; penguatan kompetensi ASN terkait layanan legislatif. | Ekspansi layanan: pemberdayaan dukungan kerja DPRD; peningkatan kualitas persidangan; percepatan digitalisasi dokumen dan manajemen arsip legislatif. | Konsolidasi layanan persidangan; integrasi sistem digital; penguatan kapasitas pengawasan dan pelaporan. | Pemantapan capaian layanan dan optimalisasi dukungan administrasi; stabilisasi sistem digital; peningkatan kualitas dokumentasi persidangan. |
| Penyusunan baseline kinerja layanan DPRD; pemetaan kebutuhan peningkatan kepuasan DPRD.                                                                          | Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan layanan legislatif, teknis administrasi, dan pengelolaan dokumen digital.                                                       | Evaluasi indeks kepuasan DPRD; penyempurnaan alur pelayanan dan komunikasi.                                                                           | Konsolidasi hasil evaluasi; peningkatan manajemen kinerja layanan DPRD.                                  | Penyempurnaan hasil evaluasi untuk Renstra berikutnya; perbaikan berkelanjutan.                                                              |
| Penyelarasan renja dengan kebutuhan DPRD; penguatan fungsi fasilitasi dukungan persidangan.                                                                      | Peningkatan kualitas layanan: pengembangan alat kerja, sistem pemantauan layanan, dan percepatan respons administrasi.                                                    | Integrasi sistem informasi pendukung layanan DPRD; penerapan standar mutu layanan.                                                                    | Penguatan monitoring dan evaluasi layanan; penyesuaian SOP sesuai dinamika kebutuhan DPRD.               | Optimalisasi layanan DPRD secara menyeluruh; peningkatan akuntabilitas dukungan kesekretariatan.                                             |
| Peningkatan literasi digital ASN; persiapan implementasi sistem digital untuk dokumen legislatif.                                                                | Implementasi awal digitalisasi dokumen; pelatihan pengelolaan arsip digital.                                                                                              | Perluasan sistem digital; optimalisasi penggunaan aplikasi pendukung layanan DPRD.                                                                    | Konsolidasi sistem digital; integrasi data dan proses.                                                   | Peningkatan kematangan sistem digital layanan DPRD.                                                                                          |

3.2.1 Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan arah kebijakan yang mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, serta dinamika politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan menuntut adanya kebijakan DPRD yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, penyusunan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, serta visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah.

Pendekatan yang digunakan menekankan pada peningkatan sinergi antar lembaga pemerintahan, penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sekretariat DPRD dan anggota DPRD. Setiap fungsi DPRD—baik legislasi, anggaran, maupun pengawasan—dirancang agar lebih efektif, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) bagi kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat kemitraan antara DPRD dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya melalui komunikasi

politik yang konstruktif, dialog publik, dan penyebarluasan informasi kebijakan daerah. Dengan demikian, DPRD berperan aktif dalam menjaga transparansi proses pembangunan dan memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan aspirasi rakyat.

Selain itu, arah kebijakan DPRD menitikberatkan pada upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, optimalisasi kinerja alat kelengkapan dewan, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan. Hal ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dengan adanya arah kebijakan ini, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu berperan strategis dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang berdaya saing, demokratis, dan berkeadilan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.3 Arah Kebijakan

| No | Operasionalisasi NSPK                                                                | Arah Kebijakan RPJMD                                                                             | Arah Kebijakan Renstra DPRD                                                                                                                             | Ket. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, transparan, dan akuntabel | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang partisipatif dan berbasis kinerja | Memperkuat fungsi legislasi DPRD melalui peningkatan kualitas pembentukan Perda yang berorientasi pada kepentingan publik dan sesuai kebutuhan daerah   |      |
| 2  | Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan berbasis data                         | Mewujudkan pengawasan pembangunan daerah yang transparan dan berorientasi hasil                  | Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD melalui penguatan kapasitas anggota, penggunaan sistem informasi pengawasan, dan pelibatan masyarakat   |      |
| 3  | Penguatan perencanaan dan penganggaran daerah berbasis kinerja                       | Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah                               | Mengoptimalkan fungsi anggaran DPRD dengan memastikan alokasi anggaran berpihak pada pelayanan publik, pembangunan inklusif, dan pengentasan kemiskinan |      |
| 4  | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM DPRD                                       | Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur daerah                                      | Mengembangkan kompetensi anggota DPRD dan sekretariat melalui pelatihan, bimtek, dan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung tugas kedewanan     |      |
| 5  | Peningkatan komunikasi dan partisipasi publik dalam proses kebijakan daerah          | Mewujudkan pemerintahan daerah yang inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat          | Mendorong keterbukaan DPRD melalui forum dengar pendapat, reses tematik, dan publikasi hasil pengawasan secara transparan                               |      |
| 6  | Sinergi antar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah                              | Meningkatkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perumusan kebijakan | Memperkuat kemitraan DPRD dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah             |      |

## BAB IV

### PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

#### 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025 - 2029, maka untuk Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

##### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota :**

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

#### Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

#### 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up

#### 9. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

- Fasilitasi Fraksi DPRD
- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

### **II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

#### 1. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- Fasilitasi penyusunan Penjelasan / Keterangan dan atau Naskah Akademik

#### 2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- Pembahasan KUA dan PPAS
- Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan
- Pembahasan APBD
- Pembahasan APBD Perubahan
- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

#### 3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

#### 4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- Pendalaman Tugas DPRD
- Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli

#### 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- Pelaksanaan Reses

#### 6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- Penyusunan Kode Etik DPRD

- Pengawasan Kode Etik DPRD

#### 7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                   | BASELINE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                          |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                  |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                     |                   |                                                          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                        |                  |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                   | PAGU              |                                                          |
| (01)                                                                                | (02)                                                                                                                                                   | (03)             | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                                     | (14)              | (15)                                                     |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD                                                             |                                                                                                                                                        |                  |      |                                 | 63.421.994.481,00 |        | 63.421.994.481,00 |        | 63.421.994.481,00 |        | 63.579.469.481,00 |                                                          | 63.421.994.481,00 |                                                          |
| 4.02.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA      |                                                                                                                                                        |                  |      |                                 | 40.507.426.906,00 |        | 40.507.426.906,00 |        | 40.507.426.906,00 |        | 40.664.901.906,00 |                                                          | 40.507.426.906,00 |                                                          |
| Meningkatnya kualitas<br>pelaksanaan urusan<br>pemerintahan dan pelayanan<br>publik | Persentase Pemenuhan<br>Komponen AKIP OPD<br>(%)                                                                                                       | 100              | 100  | 100                             | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.664.901.906,00 | 100                                                      | 40.507.426.906,00 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat DPRD |
|                                                                                     | Persentase Pemenuhan<br>Komponen SKM (%)                                                                                                               | 100              | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat DPRD |                   |                                                          |
| 4.02.02 - PROGRAM<br>DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS<br>DAN FUNGSI DPRD               |                                                                                                                                                        |                  |      |                                 | 22.914.567.575,00 |        | 22.914.567.575,00 |        | 22.914.567.575,00 |        | 22.914.567.575,00 |                                                          | 22.914.567.575,00 |                                                          |
| Meningkatnya kualitas<br>persidangan dan kajian<br>peraturan perundang-undangan     | Cakupan dukungan<br>pelaksanaan tugas dan<br>fungsi DPRD dalam<br>Pembentukan Peraturan<br>Daerah, Fungsi<br>Penganggaran dan<br>Fungsi Pengawasan (*) | 0                | 100  | 100                             | 22.914.567.575,00 | 100    | 22.914.567.575,00 | 100    | 22.914.567.575,00 | 100    | 22.914.567.575,00 | 100                                                      | 22.914.567.575,00 | Dinas/Badan yang<br>menangani Bidang<br>Sekretariat DPRD |
| TOTAL KESELURUHAN                                                                   |                                                                                                                                                        |                  |      |                                 | 63421994481.00    |        | 63421994481.00    |        | 63421994481.00    |        | 63579469481.00    |                                                          | 63421994481.00    |                                                          |

**TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD**

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN                                        | TUJUAN                                                         | SASARAN                                       | OUTCOME                                                                   | OUTPUT                               | INDIKATOR                                                                                                                            | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                   | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                       | (02)                                                           | (03)                                          | (04)                                                                      | (05)                                 | (06)                                                                                                                                 | (07)                                                                               | (08)       |
| <b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT</b> |                                                                |                                               |                                                                           |                                      |                                                                                                                                      |                                                                                    |            |
| - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                     | MENINGKATNYA KEPUASAN DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD |                                                                           |                                      | Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)                                                                    |                                                                                    |            |
|                                                                            |                                                                |                                               | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan |                                      | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan (*) | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                       |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           | Tercapainya Perda Dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)                                                                 | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)                                        | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)                      | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)                                                                                   | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)                                        | 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)                                                                 | 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)                                                                                   | 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)                      | 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           | Frekuensi Pembahasan Anggaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)                                                                                       | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |
|                                                                            |                                                                |                                               |                                                                           |                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)                                                                             | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                    | INDIKATOR                                                                                         | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                      | (06)                                                                                              | (07)                                                                               | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)                                            | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)                                 | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)                        | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)                                            | 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS                                        |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)                        | 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)                                                    | 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD                                                |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)                                          | 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan                                      |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)                                 | 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |            |
|                                     |        |         |         | Frekuensi Rekomendasi Pembahasan Anggaran | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                             |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |            |
|                                     |        |         |         | Frekuensi Pembahasan Anggaran             | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)                                              | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)                                           | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)                                            | 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)                                              | 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD                                          |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)                                            | 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)                                           | 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                 |            |
|                                     |        |         |         | Terserapnya Aspirasi Masyarakat           | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)                                                  | 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                     |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                  | OUTCOME                                                                    | OUTPUT                                         | INDIKATOR                                                                       | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                      | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)                                                                     | (04)                                                                       | (05)                                           | (06)                                                                            | (07)                                                                  | (08)       |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)                                | 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses                                 |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)                               | 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD              |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)                        | 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD              |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)                               | 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD                         |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)                        | 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD                         |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            | Persentase Tugas DPRD Yang Difasilitasi        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)    | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD                                  |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD                                  |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD                                  |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                   |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)    | 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah     |            |
|                                     |        | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah | Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik |                                                | Nilai AKIP OPD (*)                                                              |                                                                       |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (*)                                      |                                                                       |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)                                      | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            |
|                                     |        |                                                                          |                                                                            |                                                | Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)                                           | 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                          | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                      | (06)                                                                                                                                                                             | (07)                                                                                                      | (08)       |
|                                     |        |         |         | Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN        | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Kepegawaian      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                        | 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)                                                                                           | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                                                                                                    | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |
|                                     |        |         |         |                                           | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                                                                                                | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                                 | INDIKATOR                                                                                        | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                     | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                   | (06)                                                                                             | (07)                                                                                 | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)       | 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                           | 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                       | 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                                | 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)           | 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)                    | 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penda | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Penunjang urusan Penda                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                              | INDIKATOR                                                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                                                                        | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                                | (06)                                                                                                          | (07)                                                                                                                                    | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                     |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                                       | 4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)                                                      | 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                    |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)                                                      | 4.02.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                                     |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)                                             | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                                  |            |
|                                     |        |         |         |                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)                                                     | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                                  |            |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT                                | INDIKATOR                                                                     | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                   | KETERANGAN |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                | (02)   | (03)    | (04)    | (05)                                  | (06)                                                                          | (07)                                                               | (08)       |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)           | 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD             |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)             | 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD     |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)           | 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD      |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)                     | 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD              |            |
|                                     |        |         |         | Tersedianya Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)                          | 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD                           |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD                           |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)              | 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD                           |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)                          | 4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD                          |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan) | 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |            |
|                                     |        |         |         |                                       | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)              | 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD         |            |

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN /  
SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                          | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                 | BASELI<br>NE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | KETERAN<br>GAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                               | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                               | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                          | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (15)           |
| 4.02 - SEKRETARIAT DPRD                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                               |                                 | 63.421.994.481,00 |        | 63.421.994.481,00 |        | 63.421.994.481,00 |        | 63.579.469.481,00 |        | 63.421.994.481,00 |                |
| 4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |                                                                                                                                                                                  |                               |                                 | 40.507.426.906,00 |        | 40.507.426.906,00 |        | 40.507.426.906,00 |        | 40.664.901.906,00 |        | 40.507.426.906,00 |                |
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan publik                                | Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD (%)                                                                                                                                       | 100                           | 100                             | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.507.426.906,00 | 100    | 40.664.901.906,00 | 100    | 40.507.426.906,00 |                |
|                                                                                                           | Persentase Pemenuhan Komponen SKM (%)                                                                                                                                            | 100                           | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   |                |
| 4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                                                                                                                                                                                  |                               |                                 | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |                |
| Jumlah Dokumen Renstra, Renja, LPPK, LKPJ                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 26                            | 12                              | 50.000.000,00     | 12     | 50.000.000,00     | 12     | 50.000.000,00     | 12     | 50.000.000,00     | 12     | 50.000.000,00     |                |
| 4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                  |                               |                                 | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |                |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 26 | 12 | 50.000.000,00    | 12 | 50.000.000,00    | 12 | 50.000.000,00    | 12 | 50.000.000,00    | 12 | 50.000.000,00    |  |
| 4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |    |    | 6.326.041.597,00 |    | 6.326.041.597,00 |    | 6.326.041.597,00 |    | 6.326.041.597,00 |    | 6.326.041.597,00 |  |
| Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 12 | 12 | 6.326.041.597,00 | 12 | 6.326.041.597,00 | 12 | 6.326.041.597,00 | 12 | 6.326.041.597,00 | 12 | 6.326.041.597,00 |  |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 34 | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
| 4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |    |    | 5.185.536.979,00 |    | 5.185.536.979,00 |    | 5.185.536.979,00 |    | 5.185.536.979,00 |    | 5.185.536.979,00 |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 34 | 12 | 5.185.536.979,00 | 12 | 5.185.536.979,00 | 12 | 5.185.536.979,00 | 12 | 5.185.536.979,00 | 12 | 5.185.536.979,00 |  |
| 4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |    |    | 1.140.504.618,00 |    | 1.140.504.618,00 |    | 1.140.504.618,00 |    | 1.140.504.618,00 |    | 1.140.504.618,00 |  |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 12 | 12 | 1.140.504.618,00 | 12 | 1.140.504.618,00 | 12 | 1.140.504.618,00 | 12 | 1.140.504.618,00 | 12 | 1.140.504.618,00 |  |
| 4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |    |    | 686.659.588,00   |    | 686.659.588,00   |    | 686.659.588,00   |    | 686.659.588,00   |    | 686.659.588,00   |  |
| Tersedianya Administrasi Kepegawaian                                                                                                                                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 1  | 2  | 686.659.588,00   | 2  | 686.659.588,00   | 2  | 686.659.588,00   | 2  | 686.659.588,00   | 2  | 686.659.588,00   |  |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)                                                                                      | 34 | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
| 4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |    |    | 386.659.588,00   |    | 386.659.588,00   |    | 386.659.588,00   |    | 386.659.588,00   |    | 386.659.588,00   |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)                                                                                                                   | 1  | 2  | 386.659.588,00   | 2  | 386.659.588,00   | 2  | 386.659.588,00   | 2  | 386.659.588,00   | 2  | 386.659.588,00   |  |

|                                                                                      |                                                                                             |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|
| 4.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                             |    |    | 300.000.000,00   |    | 300.000.000,00   |    | 300.000.000,00   |    | 300.000.000,00   |    | 300.000.000,00   |  |
| Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | 34 | 12 | 300.000.000,00   | 12 | 300.000.000,00   | 12 | 300.000.000,00   | 12 | 300.000.000,00   | 12 | 300.000.000,00   |  |
| 4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                             |    |    | 1.765.392.102,00 |    | 1.765.392.102,00 |    | 1.765.392.102,00 |    | 1.765.392.102,00 |    | 1.765.392.102,00 |  |
| Tersedianya Administrasi Perangkat Daerah                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1  | 12 | 1.765.392.102,00 | 12 | 1.765.392.102,00 | 12 | 1.765.392.102,00 | 12 | 1.765.392.102,00 | 12 | 1.765.392.102,00 |  |
|                                                                                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                      | 1  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
|                                                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                  | 1  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)               | 12 | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
|                                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)      | 1  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
|                                                                                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                           | 1  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
| 4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                             |    |    | 154.168.986,00   |    | 154.168.986,00   |    | 154.168.986,00   |    | 154.168.986,00   |    | 154.168.986,00   |  |
| Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)  | 1  | 12 | 154.168.986,00   | 12 | 154.168.986,00   | 12 | 154.168.986,00   | 12 | 154.168.986,00   | 12 | 154.168.986,00   |  |
| 4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                             |    |    | 213.507.558,00   |    | 213.507.558,00   |    | 213.507.558,00   |    | 213.507.558,00   |    | 213.507.558,00   |  |

|                                                                                 |                                                                                        |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------|
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                 | 1                   | 12                              | 213.507.558,00   | 12     | 213.507.558,00   | 12     | 213.507.558,00   | 12     | 213.507.558,00   | 12     | 213.507.558,00   |            |
| 4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                            |                                                                                        |                     |                                 | 224.839.689,00   |        | 224.839.689,00   |        | 224.839.689,00   |        | 224.839.689,00   |        | 224.839.689,00   |            |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                             | 1                   | 12                              | 224.839.689,00   | 12     | 224.839.689,00   | 12     | 224.839.689,00   | 12     | 224.839.689,00   | 12     | 224.839.689,00   |            |
| 4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                   |                                                                                        |                     |                                 | 275.985.778,00   |        | 275.985.778,00   |        | 275.985.778,00   |        | 275.985.778,00   |        | 275.985.778,00   |            |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                    | 1                   | 12                              | 275.985.778,00   | 12     | 275.985.778,00   | 12     | 275.985.778,00   | 12     | 275.985.778,00   | 12     | 275.985.778,00   |            |
| 4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                                                                                        |                     |                                 | 650.060.400,00   |        | 650.060.400,00   |        | 650.060.400,00   |        | 650.060.400,00   |        | 650.060.400,00   |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                             | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | KETERANGAN |
|                                                                                 |                                                                                        |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |            |
|                                                                                 |                                                                                        |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |            |
| (01)                                                                            | (02)                                                                                   | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (15)       |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 1                   | 12                              | 650.060.400,00   | 12     | 650.060.400,00   | 12     | 650.060.400,00   | 12     | 650.060.400,00   | 12     | 650.060.400,00   |            |
| 4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                                                                                        |                     |                                 | 246.829.691,00   |        | 246.829.691,00   |        | 246.829.691,00   |        | 246.829.691,00   |        | 246.829.691,00   |            |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)          | 12                  | 12                              | 246.829.691,00   | 12     | 246.829.691,00   | 12     | 246.829.691,00   | 12     | 246.829.691,00   | 12     | 246.829.691,00   |            |
| 4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                                                                        |                     |                                 | 1.140.218.105,00 |        | 1.140.218.105,00 |        | 1.140.218.105,00 |        | 1.140.218.105,00 |        | 1.140.218.105,00 |            |
| Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang                                           | 2                   | 12                              | 1.140.218.105,00 | 12     | 1.140.218.105,00 | 12     | 1.140.218.105,00 | 12     | 1.140.218.105,00 | 12     | 1.140.218.105,00 |            |

|                                                                         |                                                                                                  |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|
|                                                                         | Disediakan (Unit)                                                                                |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|                                                                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 1  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  |  |
|                                                                         | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 2  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  | 2  |                  |  |
| 4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                  |    |    | 272.946.892,00   |    | 272.946.892,00   |    | 272.946.892,00   |    | 272.946.892,00   |    | 272.946.892,00   |  |
| Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                     | 2  | 2  | 272.946.892,00   | 2  | 272.946.892,00   | 2  | 272.946.892,00   | 2  | 272.946.892,00   | 2  | 272.946.892,00   |  |
| 4.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               |                                                                                                  |    |    | 367.271.213,00   |    | 367.271.213,00   |    | 367.271.213,00   |    | 367.271.213,00   |    | 367.271.213,00   |  |
| Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                   | 2  | 12 | 367.271.213,00   | 12 | 367.271.213,00   | 12 | 367.271.213,00   | 12 | 367.271.213,00   | 12 | 367.271.213,00   |  |
| 4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       |                                                                                                  |    |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |  |
| Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                           | 1  | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 500.000.000,00   | 2  | 500.000.000,00   |  |
| 4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                                                                                                  |    |    | 1.660.515.884,00 |    | 1.660.515.884,00 |    | 1.660.515.884,00 |    | 1.660.515.884,00 |    | 1.660.515.884,00 |  |
| Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemda                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | 12 | 12 | 1.660.515.884,00 | 12 | 1.660.515.884,00 | 12 | 1.660.515.884,00 | 12 | 1.660.515.884,00 | 12 | 1.660.515.884,00 |  |
|                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                   | 12 | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
|                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)                                          | 12 | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
| 4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                      |                                                                                                  |    |    | 17.788.815,00    |    | 17.788.815,00    |    | 17.788.815,00    |    | 17.788.815,00    |    | 17.788.815,00    |  |
| Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa                                                                   | 12 | 12 | 17.788.815,00    | 12 | 17.788.815,00    | 12 | 17.788.815,00    | 12 | 17.788.815,00    | 12 | 17.788.815,00    |  |

|                                                                                                      |                                                                                                               |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------|
| Menyurat                                                                                             | Surat Menyurat (Laporan)                                                                                      |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |            |
| 4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          |                                                                                                               |                     |                                 | 585.682.592,00   |        | 585.682.592,00   |        | 585.682.592,00   |        | 585.682.592,00   |        | 585.682.592,00   |            |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                  | 12                              | 585.682.592,00   | 12     | 585.682.592,00   | 12     | 585.682.592,00   | 12     | 585.682.592,00   | 12     | 585.682.592,00   |            |
| 4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            |                                                                                                               |                     |                                 | 1.057.044.477,00 |        | 1.057.044.477,00 |        | 1.057.044.477,00 |        | 1.057.044.477,00 |        | 1.057.044.477,00 |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | KETERANGAN |
|                                                                                                      |                                                                                                               |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |            |
|                                                                                                      |                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |            |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (15)       |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                  | 12                              | 1.057.044.477,00 | 12     | 1.057.044.477,00 | 12     | 1.057.044.477,00 | 12     | 1.057.044.477,00 | 12     | 1.057.044.477,00 |            |
| 4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 |                                                                                                               |                     |                                 | 2.528.669.013,00 |        | 2.528.669.013,00 |        | 2.528.669.013,00 |        | 2.528.669.013,00 |        | 2.528.669.013,00 |            |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 27                  | 12                              | 2.528.669.013,00 | 12     | 2.528.669.013,00 | 12     | 2.528.669.013,00 | 12     | 2.528.669.013,00 | 12     | 2.528.669.013,00 |            |
|                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 14                  | 12                              |                  | 12     |                  | 12     |                  | 12     |                  |        |                  |            |
|                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 38                  | 12                              |                  | 12     |                  | 12     |                  | 12     |                  |        |                  |            |
|                                                                                                      | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)                                                      | 2                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |            |
| 4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan |                                                                                                               |                     |                                 | 767.787.350,00   |        | 767.787.350,00   |        | 767.787.350,00   |        | 767.787.350,00   |        | 767.787.350,00   |            |

|                                                                                                                     |                                                                                                               |    |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--|
| Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                  |                                                                                                               |    |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |  |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | 38 | 12 | 767.787.350,00    | 12 | 767.787.350,00    | 12 | 767.787.350,00    | 12 | 767.787.350,00    | 12 | 767.787.350,00    |  |
| 4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                        |                                                                                                               |    |    | 509.342.288,00    |    | 509.342.288,00    |    | 509.342.288,00    |    | 509.342.288,00    |    | 509.342.288,00    |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)                                                     | 27 | 12 | 509.342.288,00    | 12 | 509.342.288,00    | 12 | 509.342.288,00    | 12 | 509.342.288,00    | 12 | 509.342.288,00    |  |
| 4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                               |    |    | 1.231.539.375,00  |    | 1.231.539.375,00  |    | 1.231.539.375,00  |    | 1.231.539.375,00  |    | 1.231.539.375,00  |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 14 | 12 | 1.231.539.375,00  | 12 | 1.231.539.375,00  | 12 | 1.231.539.375,00  | 12 | 1.231.539.375,00  | 12 | 1.231.539.375,00  |  |
| 4.02.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                 |                                                                                                               |    |    | 20.000.000,00     |    | 20.000.000,00     |    | 20.000.000,00     |    | 20.000.000,00     |    | 20.000.000,00     |  |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah                                                                       | Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)                                                      | 2  | 1  | 20.000.000,00     | 1  | 20.000.000,00     | 1  | 20.000.000,00     | 1  | 20.000.000,00     | 1  | 20.000.000,00     |  |
| 4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                              |                                                                                                               |    |    | 24.783.622.073,00 |    | 24.783.622.073,00 |    | 24.783.622.073,00 |    | 24.941.097.073,00 |    | 24.783.622.073,00 |  |
| Tersedianya Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan DPRD                                                                 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)                                             | 35 | 35 | 24.783.622.073,00 | 35 | 24.783.622.073,00 | 35 | 24.783.622.073,00 | 35 | 24.941.097.073,00 | 35 | 24.783.622.073,00 |  |
|                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)                                                     | 35 | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   |  |
|                                                                                                                     | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)                                           | 35 | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   | 35 |                   |  |
| 4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                      |                                                                                                               |    |    | 24.171.097.073,00 |    | 24.171.097.073,00 |    | 24.171.097.073,00 |    | 24.171.097.073,00 |    | 24.171.097.073,00 |  |
| Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD                                                                               | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)                                             | 35 | 35 | 24.171.097.073,00 | 35 | 24.171.097.073,00 | 35 | 24.171.097.073,00 | 35 | 24.171.097.073,00 | 35 | 24.171.097.073,00 |  |
| 4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian                                                                              |                                                                                                               |    |    | 462.525.000,00    |    | 462.525.000,00    |    | 462.525.000,00    |    | 620.000.000,00    |    | 462.525.000,00    |  |

|                                                                           |                                                                                               |    |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|--|
| Dinas dan Atribut DPRD                                                    |                                                                                               |    |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |     |                   |  |
| Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                   | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)                           | 35 | 35  | 462.525.000,00    | 35  | 462.525.000,00    | 35  | 462.525.000,00    | 35  | 620.000.000,00    | 35  | 462.525.000,00    |  |
| 4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                     |                                                                                               |    |     | 150.000.000,00    |     | 150.000.000,00    |     | 150.000.000,00    |     | 150.000.000,00    |     | 150.000.000,00    |  |
| Terlaksananya Medical Check Up DPRD                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)                                     | 35 | 35  | 150.000.000,00    | 35  | 150.000.000,00    | 35  | 150.000.000,00    | 35  | 150.000.000,00    | 35  | 150.000.000,00    |  |
| 4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD                                  |                                                                                               |    |     | 1.566.308.544,00  |     | 1.566.308.544,00  |     | 1.566.308.544,00  |     | 1.566.308.544,00  |     | 1.566.308.544,00  |  |
| Tersedianya Layanan Administrasi DPRD                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)                                          | 12 | 12  | 1.566.308.544,00  | 12  | 1.566.308.544,00  | 12  | 1.566.308.544,00  | 12  | 1.566.308.544,00  | 12  | 1.566.308.544,00  |  |
|                                                                           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)                              | 2  | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   |  |
|                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)                 | 12 | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   | 12  |                   |  |
| 4.02.01.2.16.0002 - Fasilitas Fraksi DPRD                                 |                                                                                               |    |     | 535.080.150,00    |     | 535.080.150,00    |     | 535.080.150,00    |     | 535.080.150,00    |     | 535.080.150,00    |  |
| Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD                                       | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD (Laporan)                                          | 12 | 12  | 535.080.150,00    | 12  | 535.080.150,00    | 12  | 535.080.150,00    | 12  | 535.080.150,00    | 12  | 535.080.150,00    |  |
| 4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD        |                                                                                               |    |     | 673.789.078,00    |     | 673.789.078,00    |     | 673.789.078,00    |     | 673.789.078,00    |     | 673.789.078,00    |  |
| Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)                 | 12 | 12  | 673.789.078,00    | 12  | 673.789.078,00    | 12  | 673.789.078,00    | 12  | 673.789.078,00    | 12  | 673.789.078,00    |  |
| 4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                |                                                                                               |    |     | 357.439.316,00    |     | 357.439.316,00    |     | 357.439.316,00    |     | 357.439.316,00    |     | 357.439.316,00    |  |
| Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)                              | 2  | 12  | 357.439.316,00    | 12  | 357.439.316,00    | 12  | 357.439.316,00    | 12  | 357.439.316,00    | 12  | 357.439.316,00    |  |
| 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD              |                                                                                               |    |     | 22.914.567.575,00 |     | 22.914.567.575,00 |     | 22.914.567.575,00 |     | 22.914.567.575,00 |     | 22.914.567.575,00 |  |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi | 0  | 100 | 22.914.567.575,00 | 100 | 22.914.567.575,00 | 100 | 22.914.567.575,00 | 100 | 22.914.567.575,00 | 100 | 22.914.567.575,00 |  |

|                                                                                    |                                                                                                                 |    |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|
|                                                                                    | Penganggaran dan Fungsi Pengawasan (*)                                                                          |    |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |
| 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |                                                                                                                 |    |   | 5.172.624.184,00 |   | 5.172.624.184,00 |   | 5.172.624.184,00 |   | 5.172.624.184,00 |   | 5.172.624.184,00 |  |
| Tercapainya Perda Dan Peraturan DPRD                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 7  | 5 | 5.172.624.184,00 | 5 | 5.172.624.184,00 | 5 | 5.172.624.184,00 | 5 | 5.172.624.184,00 | 5 | 5.172.624.184,00 |  |
|                                                                                    | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)                                                              | 1  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  |  |
|                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)                                            | 14 | 5 |                  | 5 |                  | 5 |                  | 5 |                  | 5 |                  |  |
|                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)                   | 1  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  |  |
| 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                                                                                                                 |    |   | 1.108.375.125,00 |   | 1.108.375.125,00 |   | 1.108.375.125,00 |   | 1.108.375.125,00 |   | 1.108.375.125,00 |  |
| Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah       | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)                   | 1  | 1 | 1.108.375.125,00 | 1 | 1.108.375.125,00 | 1 | 1.108.375.125,00 | 1 | 1.108.375.125,00 | 1 | 1.108.375.125,00 |  |
| 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                                                                                                                 |    |   | 2.933.654.291,00 |   | 2.933.654.291,00 |   | 2.933.654.291,00 |   | 2.933.654.291,00 |   | 2.933.654.291,00 |  |
| Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)                                            | 14 | 5 | 2.933.654.291,00 | 5 | 2.933.654.291,00 | 5 | 2.933.654.291,00 | 5 | 2.933.654.291,00 | 5 | 2.933.654.291,00 |  |
| 4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |                                                                                                                 |    |   | 523.741.955,00   |   | 523.741.955,00   |   | 523.741.955,00   |   | 523.741.955,00   |   | 523.741.955,00   |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                            | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)                                                              | 1  | 1 | 523.741.955,00   | 1 | 523.741.955,00   | 1 | 523.741.955,00   | 1 | 523.741.955,00   | 1 | 523.741.955,00   |  |
| 4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan                    |                                                                                                                 |    |   | 606.852.813,00   |   | 606.852.813,00   |   | 606.852.813,00   |   | 606.852.813,00   |   | 606.852.813,00   |  |

|                                                                                        |                                                                                                                 |   |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|
| Naskah Akademik                                                                        |                                                                                                                 |   |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |
| Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen) | 7 | 5 | 606.852.813,00   | 5 | 606.852.813,00   | 5 | 606.852.813,00   | 5 | 606.852.813,00   | 5 | 606.852.813,00   |  |
| 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                           |                                                                                                                 |   |   | 1.627.802.219,00 |   | 1.627.802.219,00 |   | 1.627.802.219,00 |   | 1.627.802.219,00 |   | 1.627.802.219,00 |  |
| Frekuensi Pembahasan Anggaran                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)                                                          | 2 | 2 | 1.627.802.219,00 | 2 | 1.627.802.219,00 | 2 | 1.627.802.219,00 | 2 | 1.627.802.219,00 | 2 | 1.627.802.219,00 |  |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)                                      | 2 | 2 |                  | 2 |                  | 2 |                  | 2 |                  | 2 |                  |  |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)                                               | 1 | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  |  |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)                                                                  | 1 | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  |  |
|                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)                                                        | 1 | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  | 1 |                  |  |
|                                                                                        |                                                                                                                 |   |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |
| 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS                                            |                                                                                                                 |   |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |  |
| Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)                                                          | 2 | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    |  |
| 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                        |                                                                                                                 |   |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |   | 20.000.000,00    |  |
| Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                              | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)                                      | 2 | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    | 2 | 20.000.000,00    |  |
| 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD                                                    |                                                                                                                 |   |   | 655.799.672,00   |   | 655.799.672,00   |   | 655.799.672,00   |   | 655.799.672,00   |   | 655.799.672,00   |  |
| Terlaksananya Pembahasan APBD                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)                                                                  | 1 | 1 | 655.799.672,00   | 1 | 655.799.672,00   | 1 | 655.799.672,00   | 1 | 655.799.672,00   | 1 | 655.799.672,00   |  |
| 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan                                          |                                                                                                                 |   |   | 373.960.422,00   |   | 373.960.422,00   |   | 373.960.422,00   |   | 373.960.422,00   |   | 373.960.422,00   |  |
| Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)                                                        | 1 | 1 | 373.960.422,00   | 1 | 373.960.422,00   | 1 | 373.960.422,00   | 1 | 373.960.422,00   | 1 | 373.960.422,00   |  |

|                                                                                    |                                                                                                   |    |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |    |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|--|
| 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |                                                                                                   |    |    | 558.042.125,00   |    | 558.042.125,00   |    | 558.042.125,00   |    | 558.042.125,00   |    | 558.042.125,00   |  |
| Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)                                 | 1  | 1  | 558.042.125,00   | 1  | 558.042.125,00   | 1  | 558.042.125,00   | 1  | 558.042.125,00   | 1  | 558.042.125,00   |  |
| 4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                             |                                                                                                   |    |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |  |
| Frekuensi Rekomendasi Pembahasan Anggaran                                          | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1  | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   |  |
| 4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |                                                                                                   |    |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |    | 500.000.000,00   |  |
| Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah       | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen) | 1  | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   | 1  | 500.000.000,00   |  |
| 4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD                                          |                                                                                                   |    |    | 2.568.003.566,00 |    | 2.568.003.566,00 |    | 2.568.003.566,00 |    | 2.568.003.566,00 |    | 2.568.003.566,00 |  |
| Frekuensi Pembahasan Anggaran                                                      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)                                           | 12 | 10 | 2.568.003.566,00 | 10 | 2.568.003.566,00 | 10 | 2.568.003.566,00 | 10 | 2.568.003.566,00 | 10 | 2.568.003.566,00 |  |
|                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)                                              | 35 | 35 |                  | 35 |                  | 35 |                  | 35 |                  | 35 |                  |  |
|                                                                                    | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)                                            | 8  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  | 12 |                  |  |
| 4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD                                          |                                                                                                   |    |    | 1.113.200.000,00 |    | 1.113.200.000,00 |    | 1.113.200.000,00 |    | 1.113.200.000,00 |    | 1.113.200.000,00 |  |
| Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)                                              | 35 | 35 | 1.113.200.000,00 | 35 | 1.113.200.000,00 | 35 | 1.113.200.000,00 | 35 | 1.113.200.000,00 | 35 | 1.113.200.000,00 |  |
| 4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         |                                                                                                   |    |    | 1.070.803.566,00 |    | 1.070.803.566,00 |    | 1.070.803.566,00 |    | 1.070.803.566,00 |    | 1.070.803.566,00 |  |
| Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                            | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)                                            | 8  | 12 | 1.070.803.566,00 | 12 | 1.070.803.566,00 | 12 | 1.070.803.566,00 | 12 | 1.070.803.566,00 | 12 | 1.070.803.566,00 |  |
| 4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                 |                                                                                                   |    |    | 384.000.000,00   |    | 384.000.000,00   |    | 384.000.000,00   |    | 384.000.000,00   |    | 384.000.000,00   |  |

|                                                                   |                                                          |                     |                                 |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------|
| Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD                      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)  | 12                  | 10                              | 384.000.000,00    | 10     | 384.000.000,00    | 10     | 384.000.000,00    | 10     | 384.000.000,00    | 10     | 384.000.000,00    |            |
| 4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat    |                                                          |                     |                                 | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |            |
| Terseapnya Aspirasi Masyarakat                                    | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)          |                     | 3                               | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  |            |
| 4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses                             |                                                          |                     |                                 | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |        | 2.191.314.659,00  |            |
| Terlaksananya Reses                                               | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)          |                     | 3                               | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  | 3      | 2.191.314.659,00  |            |
| 4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD          |                                                          |                     |                                 | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |        | 100.000.000,00    |            |
| Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                    | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 1                   | 1                               | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    | 1      | 100.000.000,00    |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | KETERANGAN |
|                                                                   |                                                          |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |            |
|                                                                   |                                                          |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |            |
| (01)                                                              | (02)                                                     | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (15)       |
|                                                                   | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)        | 1                   | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   |            |
| 4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD                     |                                                          |                     |                                 | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |            |
| Terusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                       | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)        | 1                   | 1                               | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     |            |
| 4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD                     |                                                          |                     |                                 | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |        | 50.000.000,00     |            |
| Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan) | 1                   | 1                               | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     | 1      | 50.000.000,00     |            |
| 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD                              |                                                          |                     |                                 | 10.754.822.947,00 |        | 10.754.822.947,00 |        | 10.754.822.947,00 |        | 10.754.822.947,00 |        | 10.754.822.947,00 |            |

|                                                                      |                                                                                 |   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |    |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|----|-------------------|--|
| Persentase Tugas DPRD Yang Difasilitasi                              | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 1  | 10.754.822.947,00 | 1  | 10.754.822.947,00 | 1  | 10.754.822.947,00 | 1  | 10.754.822.947,00 | 1  | 10.754.822.947,00 |  |
|                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 12 |                   | 12 |                   | 12 |                   | 12 |                   | 12 |                   |  |
|                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)    | 1 | 1  |                   | 1  |                   | 1  |                   | 1  |                   | 1  |                   |  |
| 4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |                                                                                 |   |    | 10.654.822.947,00 |    | 10.654.822.947,00 |    | 10.654.822.947,00 |    | 10.654.822.947,00 |    | 10.654.822.947,00 |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen) | 1 | 12 | 10.654.822.947,00 | 12 | 10.654.822.947,00 | 12 | 10.654.822.947,00 | 12 | 10.654.822.947,00 | 12 | 10.654.822.947,00 |  |
| 4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  |                                                                                 |   |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |  |
| Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD        | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan) | 1 | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     |  |
| 4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    |                                                                                 |   |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |    | 50.000.000,00     |  |
| Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)    | 1 | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     | 1  | 50.000.000,00     |  |

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS**

| NO                                                                         | PROGRAM PRIORITAS                                                   | OUTCOME                                                                                            | KEGIATAN / SUBKEGIATAN                                                             | KETERANGAN |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                                       | (02)                                                                | (03)                                                                                               | (04)                                                                               | (05)       |
| <b>4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD KAB. TANJUNG JABUNG BARAT</b> |                                                                     |                                                                                                    |                                                                                    |            |
| 1.                                                                         | 4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD        | Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan                          | 4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS                                        |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD                                                |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan                                      |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                             |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD                                               |            |
| 2.                                                                         | 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Terselenggaranya Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan yang Efisiensi dan Efektivitas | 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               |            |
|                                                                            |                                                                     |                                                                                                    | 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD                                             |            |

#### 4.5. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan Indikator Kinerja Kunci ( IKK )

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan adalah :

—Indeks Kepuasan Layanan” dengan satuan Persentase % dan Frekuensi pengukuran setahun sekali.

#### Target Indeks Kepuasan Layanan (2025–2029)

| Tahun | Target (%) | Keterangan                                          |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|
| 2025  | ≥ 87       | Pencapaian standar layanan sangat baik              |
| 2026  | ≥ 88       | Peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi     |
| 2027  | ≥ 89       | Layanan semakin responsif dan inovatif              |
| 2028  | ≥ 90       | Layanan prima, berbasis data dan digitalisasi penuh |
| 2029  | ≥ 91       | Layanan adaptif, modern, dan berkelanjutan          |

### 1. Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan sasaran strategis.

#### a. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah. Indikator Input yang lain merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumberdaya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan

kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dihasilkan.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun yang bersangkutan tercermin dalam analisis capaian sasaran.

Penentuan target kinerja dalam Tabel 4.5 didasarkan pada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 serta proyeksi capaian lima tahun ke depan. Penetapan target mengikuti prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

| NO   | INDIKATOR                                                                    | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN |      |      |      |      |      | KETERANGAN                                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                              |        |                           | 2025         | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                                     |
| (01) | (02)                                                                         | (03)   | (04)                      | (05)         | (06) | (07) | (08) | (09) | (10) | (11)                                                                                                                |
|      | 4.02.0.00.0.00.01.0000 -<br>SEKRETARIAT DPRD<br>KAB. TANJUNG<br>JABUNG BARAT |        |                           |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                     |
| 1.   | Indeks Kepuasan DPRD<br>terhadap pelayanan<br>Sekretariat DPRD               | Indeks | 89,67                     | 90           | 90,5 | 91   | 91,5 | 92   | 92,5 | Mengukur tingkat<br>kepuasan DPRD<br>terhadap layanan<br>administratif,<br>persidangan, dan<br>fasilitasi kedewanan |

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

| NO   | INDIKATOR                                                                  | STATUS  | SATUAN | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET TAHUN   |                |                |                |                |                | KETERANGAN |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|      |                                                                            |         |        |                           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |            |
| (01) | (02)                                                                       | (03)    | (04)   | (05)                      | (06)           | (07)           | (08)           | (09)           | (10)           | (11)           | (12)       |
| 1.   | 4.02 -<br>SEKRETARIAT<br>DPRD                                              |         |        |                           |                |                |                |                |                |                |            |
| 2.   | Persentase Capaian<br>Agenda Kerja<br>DPRD                                 | positif | %      | 100                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| 3.   | Persentase Rapat<br>DPRD yang<br>difasilitasi                              | positif | %      | 0                         | 87             | 88             | 89             | 90             | 91             | 92             |            |
| 4.   | Tingkat Kepuasan<br>Anggota DPRD<br>terhadap pelayanan<br>Sekretariat DPRD | positif | %      | 100                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |            |
| 5.   | Waktu<br>Penyampaian<br>Dokumen DPRD ke<br>Pihak Terkait                   | positif | *      | Tepat Waktu               | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu | Tepat<br>Waktu |            |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan penggabungan dari Tugas dan Fungsi dari DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini, merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing OPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Renstra OPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM, dan Masyarakat.

### **HARAPAN DAN KOMITMEN**

#### **HARAPAN**

Diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terus meningkatkan kualitas layanan administratif, fasilitasi, dan dukungan teknis kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara profesional, efektif, dan akuntabel. Terciptanya sinergi yang kuat antara Sekretariat DPRD dengan seluruh Perangkat Daerah, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Harapan agar pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dapat memanfaatkan inovasi teknologi informasi secara optimal, mendukung keterbukaan informasi publik dan efisiensi kerja. Peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD melalui pelatihan, bimtek, dan pengembangan kompetensi lainnya, guna menunjang kinerja lembaga legislatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Diharapkan Sekretariat DPRD dapat menjadi contoh penerapan prinsip good governance, termasuk dalam transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

## KOMITMEN

Kami berkomitmen untuk berperan aktif dalam mendukung setiap program, kegiatan, dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025–2029. Berkomitmen untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta lintas perangkat daerah, demi mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program DPRD yang lebih efektif. Berkomitmen untuk mendorong inovasi pelayanan di bidang dukungan kesekretariatan, serta siap beradaptasi terhadap perubahan dinamika politik, sosial, dan teknologi. Berkomitmen untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana secara optimal, sehingga mendukung kinerja optimal Sekretariat DPRD.

Berkomitmen untuk menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada pelayanan publik dalam setiap kerja sama dengan Sekretariat DPRD.

Kuala Tungkal,

2025

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,  
  
**HIDAYAT, SH, MH**  
NIP. 19660710 199403 1 013